

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta. (2021). Pemprov DKI sediakan hunian terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta. (2021). Pemprov DKI sediakan hunian terjangkau, catat syarat dan salah satu lokasinya. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta. (2021). Pemprov DKI ubah nama hunian DP 0 Rupiah jadi hunian terjangkau milik. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *RPJMD Provinsi DKI Jakarta*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Jumlah penduduk pertengahan tahun (ribu jiwa)*. Badan Pusat Statistik.
- Bareksa. (2017). Mengkaji peluang realisasi rumah DP Rp 0 untuk gaji Rp 7 juta. Bareksa.
- Detik Finance. (2021). Diresmikan 2019, seperti apa rumah DP Rp 0 pertama besutan Anies, kini? Detik Finance.
- Fitri, A., Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2021). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *Aktor: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Politik*, 1(1), 26–36.

- Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam upaya mengatasi pemukiman kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education*, 3(3), 279–281.
- IDN Financials. (2020). Bank Dunia: Tahun lalu 60,3% penduduk Indonesia masuk kategori miskin. IDN Financials.
- Kusumasari, L. (2024). Review of effectiveness on zero rupiah down payment housing scheme in Jakarta. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 6(1), 45–60.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020 tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun 2020*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Hunian DP 0 Rupiah*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRTM/2019 Tahun 2019*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia. (2021). Rumah tangga Indonesia masih hidup dalam kondisi tidak layak. Perkim Indonesia.
- Rahman, F., & Nurdin, N. (2023). Implementasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di DKI Jakarta. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 5(1), 77–89.

- Radwa, N. D., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 1489–1500.
- Reza, Y. F. (2023). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di Kota Tangerang. *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 202–215.
- Sari, A. R. (2023). Housing development for low-income communities (MBR) in Indonesia. *Jurnal Perumahan dan Permukiman*, 8(2), 99–110.
- Simbolon, A. M., Rusli, B., & Candradewini. (2024). Policy implementation of housing financing facilitation and assistance for low-income people in Bekasi District: A case study of Villa Kencana Cikarang housing. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 55–70.
- Suryani, L. (2023). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dumai Kota. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(1), 102–110.
- Tjilen, A. P. (2021). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan teori*. Nusamedia.
- Vitriana, A. (2023). Post-implementation review of low-income housing provision policy: A qualitative study with executives' perspective (case study: West Java metropolitan areas, Indonesia). *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 134–150.